

**Suluh Media**

Editor:  
Dr. Noverman Duadji  
Unang Mulkhan, MBA., Ph.D.

# **Anak, Perempuan, dan Sustainable Development Goals (SDGs)**



# **Anak, Perempuan, dan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Dr. Noverman Duadji  
Unang Mulkhan, MBA., Ph.D.  
Dr. Novita Tresiana

**Suluh Media**

**ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

*Editors:* Dr. Noverman Duadji; Unang Mulkhan, MBA,.Ph.D.; Dr. Novita Tresiana

Hak Cipta © 2017 pada penulis

**Suluh Media**

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283  
Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Duadji, Noverman

ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)/Noverman  
Duadji; Unang Mulkhan; Novita Tresiana

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Suluh Media, 2017  
x + 108 hlm.; 25 cm

Bibliografi.:

ISBN : 978-602-8610-43-8  
E-ISBN : 978-602-8610-44-5

1. Pembangunan  
I. Mulkhan, Unang  
II. Tresiana, Novita

III. Judul

362

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

---

## PENGANTAR

Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Sudah lebih dari 20 tahun isu gender di Indonesia termasuk perempuan dan anak dalam pembangunan diwacanakan, didiskusikan, dan implementasikan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktifis, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat tingkat lokal, regional, dan nasional. Terlebih, komitmen global terkait isu gender, perempuan dan anak sudah ada dalam *Millennium Development Goals* (MDGs), yang telah berakhir pada September 2015, dan dilanjutkan dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Persoalan khusus perempuan akibat diskriminasi berbasis gender di tingkat internasional pun telah menghadirkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang diterjemahkan menjadi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi tersebut telah disahkan oleh PBB pada tahun 1979, dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No 7 tahun 1984. CEDAW menetapkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan menekankan tiga prinsip penting, yakni (a) Prinsip kesetaraan/persamaan substantif ; (b) prinsip non - diskriminasi dan (c) Prinsip kewajiban negara. Sementara itu, terkait kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 1993, PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Sementara itu, berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah menghadirkan Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, Ada 4 prinsip dasar hak anak yang

terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu (a) Prinsip non-diskriminasi – tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) Prinsip kepentingan terbaik anak; (c) Hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Di tingkat nasional telah diperjuangkan berbagai Undang-Undang untuk melindungi anak dan perempuan, antara lain UU tentang Perlindungan Anak (no 23 tahun 2002) dan UU perubahannya (UU no 35 tahun 2014); UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga (No 23 Tahun 2004); UU tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (no 21 tahun 2007), UU tentang Anti Pornografi (no 44 tahun 2008), serta UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (no 11 thn 2012).

Meski demikian, berbagai persoalan diskriminasi atau perlakuan buruk dan kekerasan terus terjadi pada perempuan dan anak. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak kunjung berakhir, sebaliknya justru muncul dalam bentuk yang sangat bervariasi dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa strategi MDGs masih meninggalkan persoalan yang harus diakomodasi dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kerangka dasar dalam MDGs pada mulanya tidak mengandung *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR), tetapi sejalan dengan implementasinya, kemudian dimasukkan akses universal atas SRHR sebagai bagian dari ukuran pembangunan sejak tahun 2000, yaitu dengan memasukkan angka kematian ibu melahirkan.

Catatan dan monitor *Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women* (ARROW) dalam ICPD+15 monitoring mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara Asia yang belum menunjukkan kemajuan dalam perihal indeks SRHR. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia di tahun 2005 masih tinggi sampai dengan sekarang dan secara keseluruhan di Asia Tenggara dan Asia umumnya, yaitu rata-rata 420 (Arrow Report, 2013: <http://www.arrow.org.my/?p=about-indonesia>).

Dengan penduduk kurang lebih 228.5 juta, pertumbuhan populasi 1.36% per tahun dan kepadatan penduduk 123 orang/km, di Indonesia masih tercatat tingkat aborsi yang cukup tinggi, yaitu 15% dari kematian ibu (89% di kalangan perempuan menikah dan 11% di kalangan single). Permasalahan tersebut disebabkan oleh akses hak dan pendidikan SRHR tidak didapatkan dengan cukup baik. Di samping kematian ibu karena

melahirkan dan aborsi, terdapat pula kasus infeksi HIV/AIDS karena buruknya akses atas SRHR. Indeks SRHR di Indonesia menunjukkan rata-rata rendah dari 0.116 pada tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Perubahan iklim kemudian juga memperparah kondisi akses dan hak SRHR dengan adanya banjir di musim penghujan, kelangkaan air di musim kemarau, kelangkaan pangan, tingginya prevalensi kanker yang tinggi karena pola konsumsi makanan berubah, dan resiko bencana alam yang selalu mengintai seiring dengan buruknya konservasi lingkungan. Hal esensial lainnya yang muncul ada beberapa bulan terakhir ini adalah maraknya kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan pada korban. Selain kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak, persoalan trafficking, perbudakan manusia, dan narkoba juga semakin marak, tersistem, sulit dilacak, dan memberikan dampak berantai yang merusak kehidupan masyarakat secara umum.

Persoalan peningkatan kapasitas politik perempuan juga masih memiliki persoalan yang cukup besar. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang-bidang keputusan, baik di lembaga eksekutif, yudikatif terutama lembaga legislatif yang juga perlu adanya peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya dalam menghadapi pemilu 2019 yang akan datang.

Melihat kompleksitas persoalan di atas dan arus agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pusat Penelitian dan Pengembangan Wanita, Anak dalam Pembangunan, memandang perlu adanya kolaborasi dari beberapa penulis baik akademisi maupun pegiat isu gender, perempuan dan anak untuk terlibat dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang isu perlindungan wanita dan anak, sekaligus menemukan roadmap penelitian dan pengembangan yang diarahkan pada penyelesaian persoalan gender, wanita dan anak di atas.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Dr Novita Tresiana  
Ketua Pusat Studi Wanita, Anak dan Pembangunan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung

---

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>Bagian 1</b>	
Anak, Perempuan, dan EDITORS: Sustainable Development Goals (SDGs)	
<i>Noverman Duadji dan Unang Mulkhan</i>	1
<b>Bagian 2</b>	
Pemetaan Kondisi dan Model Ketahanan (Resilience) untuk Anak di Daerah Rawan Bencana	
<i>Diah Utami Ningsih dan Budi Kadaryanto</i>	5
<b>Bagian 3</b>	
Budaya Damai Tanpa Kekerasan Melalui berbagai Media dalam Kesetaraan Gender	
<i>Yuli Nugrahani, S.T.P.</i>	29
<b>Bagian 4</b>	
Menyusui Sebagai Implementasi dari Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	
<i>Ritma Fathi Khalida, S.Si.</i>	41
<b>Bagian 5</b>	
Harapan dan Kenyataan Tentang Jaminan Fasilitas Khusus Pekerja Perempuan	
<i>Rinda Gusvita, S.T.P., M.Sc.</i>	55

**Bagian 6**

Taman Baca Masyarakat (TBM) Kampung Merdeka <i>Galih Aditya &amp; Virdyas Eka D</i>	69
--	----

**Bagian 7**

Tantangan dan Upaya Mengurangi Rokok <i>Eni Muslihah</i>	77
---	----

**Bagian 8**

Forum Warga, Kesetaraan Gender dan Partisipasi KB Vasektomi Pria <i>Noverman Duadji dan Novita Tresiana</i>	87
--	----

**Bagian 9**

Penutup: Tantangan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Era SDGs <i>Noverman Duadji dan Unang Mulkhan</i>	105
--	-----

## BAGIAN 1

---

# EDITORS: ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

*Noverman Duadji dan Unang Mulkhan*

Peneliti Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Unila

**T**era *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir di tahun 2015 telah menciptakan beberapa tonggak penting dalam konteks kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan. Namun dalam realitasnya masih banyak perempuan mengalami kesenjangan yang signifikan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, pasar kerja dan upah, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, serta isu-isu lingkungan. Begitupun juga, masih terdapat banyak kekerasan yang dialami oleh anak. Isu kekerasan pada anak dan perempuan belum terinci dalam MDGs (Duflo, 2012), padahal di banyak negara termasuk Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan serta diskriminasi gender masih ada pada ranah ekonomi, politik, hukum dan sosial. Sehingga perlu ditangani dengan berbagai pendekatan (Alexander & Welzel, 2011; Rad et al., 2012; Kiran & Basnett, 2014).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti MDGs, memiliki cakupan yang lebih luas, lengkap dan sistematis dalam tujuan pembangunan global yang berkelanjutan untuk periode 2016 - 2030. Lebih khusus, tujuan SDGs yang ke 5 "*gender equality*" fokus pada: (1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) kesetaraan gender dalam posisi pengambilan keputusan di pemerintah, institusi publik dan swasta, dan (3) kesetaraan gender dalam distribusi kemampuan. Dengan target yang lebih rinci dalam perlindungan anak dan perempuan, SDGs diharapkan mampu

## BAGIAN 9

# PENUTUP TANTANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ERA SDGS

*Noverman Duadji dan Unang Mulkhan*

Peneliti Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Unila

Perempuan dan Anak mendapat perhatian yang serius dalam *Sustainable Development Goals*. Meskipun isu kesetaraan gender, peran atau partisipasi perempuan berdiri sendiri di tujuan/agenda ke 5 dalam SDGs, di beberapa tujuan SDGs yang lain, perempuan dan anak memiliki peran dan potensi untuk dikaji lebih dalam terkait gizi anak (tujuan ke 2), layanan kesehatan dan perawatan (tujuan ke 3), pendidikan anak dan kaum perempuan (tujuan ke 4), pertumbuhan dan pengembangan ekonomi (tujuan ke 8), perubahan iklim (tujuan ke 13), konservasi dan pelestarian masyarakat dari keanekaragaman hayati (tujuan ke 14), pembangunan perdamaian (tujuan ke 16). Penelitian dan pemberdayaan lintas sektoral dalam koridor SDGs tentang isu perempuan dan anak akhirnya memainkan peran penting.

Dalam konteks pendidikan kebencanaan, inovasi kurikulum penting untuk dapat memberikan pengetahuan dan kesiapan ketahanan dalam menghadapi bencana alam. Artinya terdapat irisan yang kuat antara isu pendidikan, lingkungan. Peningkatan pendidikan untuk kesiapan menghadapi perubahan iklim sangat penting untuk diberikan kepada anak sekolah.